

**LPORAN AKHIR
HIBAH KKS - PENGABDIAN**



**PENINGKATAN PENGETAHUAN APARAT DESA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN
MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

Oleh:

LA ODE RASULI, S.Pd, SE., MSA. 19770507 200501 1 001 (KETUA)
Dr. H. WALIDUN HUSAIN, M.Si 19550803 198203 1 002 (ANGGOTA)
SITI PRATIWI HUSAIN, SE., M.Si 19860309 200801 2 003 (ANGGOTA)

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

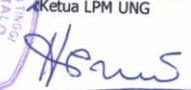
**HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN SEMESTER GENAP T.A.2015/2016**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Judul Kegiatan | : Peningkatan Pengetahuan Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa |
| 2. Lokasi | : Desa Buti |
| 3. Ketua Tim Pelaksana | |
| a. Nama | : La Ode Rasuli, S.Pd, SE, MSA |
| b. NIP | : 197705072005011001 |
| c. Jabatan/Golongan | : Lektor / 3 b |
| d. Program Studi/Jurusan | : S1 Akuntansi / Akuntansi |
| e. Bidang Keahlian | : |
| f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail | : 081340080178 |
| g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail | : - |
| 4. Anggota Tim Pelaksana | |
| a. Jumlah Anggota | : 2 orang |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian | : Dr. H. Walidun Husain, M.Si / |
| c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian | : Siti Pratiwi Husain, SE., M.Si / |
| d. Mahasiswa yang terlibat | : 30 orang |
| 5. Lembaga/Institusi Mitra | |
| a. Nama Lembaga / Mitra | : Aparat Desa Buti |
| b. Penanggung Jawab | : Kepala Desa Buti |
| c. Alamat/Telp./Fax/Surel | : Jl. Irigasi Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) | : 150 |
| e. Bidang Kerja/Usaha | : Pengelolaan Keuangan Desa |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 2 bulan |
| 7. Sumber Dana | : PNBPN 2016 |
| 8. Total Biaya | : Rp. 25.000.000,- |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hamzah Yunus, M.Pd)
NIP. 196002231986031004



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 11 Februari 2016
Ketua


(La Ode Rasuli, S.Pd, SE, MSA)
NIP. 197705072005011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN

Bab PENDAHULUAN

1

- 1.1. Analisis Situasi 1
- 1.2. Usulan Penyelesaian Masalah 3
- 1.3. Teknologi/Metode yang Digunakan Untuk Mengatasi Masalah 4
- 1.4. Prifil Pendukung 4

Bab TARGET DAN LUARAN

2

- 2.1. Tujuan 6
- 2.2. Target dan Luaran 6

Bab METODE PELAKSANAAN

3

- 3.1. Persiapan dan Pembekalan 7
- 3.2. Pelaksanaan 8
- 3.3. Rencana Keberlanjutan Program 9

Bab KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4

- 4.1. Hasil Tema KKS-Pengabdian 10
- 4.2. Pelaksana Program 10

Bab HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

5

- 5.1. Deskripsi Kinerja 12
- 5.2. Capaian Program 16

Bab KESIMPULAN DAN SARAN

6

- 6.1 Kesimpulan 17

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

RINGKASAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran berupa pendidikan dan pelatihan terhadap mitra dalam hal ini seluruh aparat pemerintah desa yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan penyusunan APBDesa. Adapun hasil yang diharapkan adalah dapat diwujudkan secara cepat dan tepat pengelolaan dan penyusunan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan, termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Metode kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). Dengan demikian secara jangka panjang secara tidak langsung dengan adanya pengelolaan keuangan yang teratur melalui APBDesa maka akan terserap sumber daya desa baik yang berasal dari luar (dana desa), alokasi dana desa (ADD), dan lainnya maupun dari dalam desa seperti Pendapatan Asli Desa (PAD) serta sumber sumber halal lainnya di desa

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pembangunan desa merupakan usaha yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di daerah pedesaan. Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut antara lain dengan proyek bantuan desa atau bangdes yang disalurkan oleh pemerintah di era orde baru. Kebijakan tersebut diteruskan oleh pemerintah kepala daerah berikutnya pada tahun 2014, yaitu adanya alokasi dana desa pada era pemerintahan SBY dan bantuan pemerintah di awal pemerintahan Jokowi lebih terasa jumlah bantuan yang diberikan dalam bentuk dana desa. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya maka bantuan dana desa mencapai ratusan juta rupiah setiap desa. Dengan jumlah dana desa yang begitu besar disalurkan oleh pemerintah, maka aparat desa selaku pengelola keuangan dana desa ini mengalami permasalahan yang serius terutama dikaitkan dengan kesiapan mereka dalam mengelola dana tersebut. Kesiapan itu dikaitkan dengan kemampuan mereka di dalam memanfaatkan dana desa dalam memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Desa pasal 82 ayat (2) telah ditegaskan bahwa pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum, serta melaporkan dalam musyawarah desa paling sedikit setahun sekali. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan, dalam hal kepala desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan maka bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa selanjutnya, sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana tersebut.

Untuk menjaga efektivitas pencairan dana desa, pemerintah telah menyusun beberapa regulasi sebagai payung hukumnya, diantaranya PP Nomor 43 tahun 2014 yang mengatur soal pembentukan/penggabungan desa, kewenangan desa, penghasilan kepala dan perangkat desa, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, yang berisi tentang proses penganggaran dana desa dalam APBN; proses perhitungan alokasi dana desa oleh pemerintah dan kabupaten/kota; proses penyaluran dana desa terkait mekanisme penyaluran; proses pelaporan dari kabupaten/kota kepada pemerintah dan desa kepada kabupaten/kota; serta proses monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa.

Dalam Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris dan perangkat desa lainnya termasuk dalam PTPKD ini. Perangkat desa lainnya juga termasuk bendahara desa. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bendahara desa mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu bendahara desa harus memahami pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar.

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa di atas, bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa beberapa pembukuan wajib diselenggarakan oleh bendahara desa. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Desa mewajibkan Bendahara desa membuat Buku Kas Umum, dan beberapa buku pembantu lainnya. Selama ini bendahara desa yang relatif sebagian besar berpendidikan bukan dari sekolah kejuruan pembukuan ataupun akuntansi, agak sedikit mengalami kesulitan untuk mengerjakan penatausahaan tersebut.

Dana desa yang demikian besar perlu direncanakan penggunaannya secara tepat dan jelas dalam membelanjai sektor-sektor pembangunan desa. Disadari banyak keluhan dari sebagian aparat pemerintah desa yang mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), sementara siap atau tidak siap setiap tahun dana desa secara terprogram dalam APBN disalurkan ke desa. Oleh karena itu, agar aparat desa memperoleh kemampuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana desa, maka dipandang perlu kepada mereka diberi sentuhan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun APBDesa.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka kami selaku dosen bersama mahasiswa melakukan program Kuliah Kerja Sibermas Pengabdian (KKS-Pengabdian) dalam bentuk pengelolaan keuangan desa. Melalui KKS pengabdian ini kami mencoba melakukan transfer ilmu dan keahlian kepada masyarakat Kecamatan Mananggu melalui keterlibatan mahasiswa dari beberapa disiplin ilmu baik manajemen, dan akuntansi. Sebanyak 30 orang mahasiswa diharapkan dapat mendampingi masyarakat Kecamatan Mananggu selama dua bulan untuk dapat meningkatkan pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Usulan Penyelesaian Masalah

Sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan dilakukan beberapa kegiatan pemberdayaan aparat desa dalam peningkatan pengetahuan mereka dalam hal mengelola keuangan desa. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan memperhatikan potensi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa, antara lain adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis tentang penyusunan APBDesa.
3. Sosialisasi Undang-Undang tentang desa dan Peraturan Pelaksanaannya.

C. Teknologi / Metode yang Digunakan Untuk Mengatasi Masalah

Guna penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mitra pada program KKS-Pengabdian kali ini, maka dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dan praktek-praktek yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 1: Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
- Aparat desa dalam mengelola keuangan desa	- Sumber daya alam yang ada di desa - Sumber dana dari luar berupa anggaran desa dan alokasi dana desa	Sumber daya manusia yang belum optimal dalam pengelolaan sumber daya desa.

D. Profil Pendukung

Program pemberdayaan aparat desa dalam peningkatan pengetahuan mereka dalam hal mengelola keuangan desa perlu melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*). Para pihak (baik secara individu maupun institusi) yang akan mendukung program ini untuk optimalisasi hasil, tujuan dan sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nama dan Peran/Kontribusi Mitra

No	Nama Mitra	Peran dan kontribusi
1.	BPKP Provinsi Gorontalo	Pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa. Pelatihan dan bimbingan teknis tentang penyusunan APBDesa
2.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Boalemo	Sosialisasi Undang-Undang tentang desa dan Peraturan Pelaksanaannya.
3.	Mahasiswa dan Dosen Pemimbinga	Melaksanakan kegiatan dan pendampingan terhadap aparat desa dan masyarakat

Bertolak dari permasalahan yang dikemukakan di atas kami dari staf pengajar Universitas Negeri Gorontalo mencoba memformulasikannya permasalahan tersebut ke dalam program KKS-Pengabdian dengan mencoba melakukan transfer ilmu kepada masyarakat pengguna melalui keterlibatan

mahasiswa secara langsung. Mahasiswa sejumlah 30 orang hidup berdampingan dengan penduduk untuk secara bersama melakukan kegiatan praktek dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi selama ini. Transfer ilmu dan teknologi tersebut melibatkan staf dosen – mahasiswa – praktisi – dan penduduk dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan di desa terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Kegiatan KKS-Pengabdian ini membawa misi untuk aparat pemerintah desa yang kapabel dan mampu mengelola administrasi keuangan desa. Melalui program ini baik dosen dan mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan, ilmu dan keterampilan maupun teknologi untuk menangani masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu KKS-Pengabdian bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan mereka dalam menerapkan ilmu di masyarakat. Adapun indikator capaian produk program KKS-Pengabdian yang dituju adalah:

a. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Aparat Desa

1. Tercapainya penyusunan APBDesa yang rutin setiap tahun
2. Aparat desa dapat memberdayakan masyarakat melalui sumber daya desa dalam peningkatan kesejahteraannya.

b. Efisiensi biaya

Agar tercipta pengelolaan keuangan desa yang tertib sehingga dapat diciptakan efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Perbaikan system

Agar dapat diwujudkan secara tepat pengelolaan dan penyusunan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan, termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan desa

d. Peningkatan partisipasi masyarakat

Dengan makin baik pengelolaan keuangan desa maka masyarakat makin percaya dan pada gilirannya akan memberikan partisipasinya secara optimal dalam pembangunan desa.

e. Peningkatan swadana dan swadaya

Dengan adanya pengelolaan keuangan yang teratur melalui APBDesa maka akan terserap sumber daya desa baik yang berasal dari luar (dana desa), alokasi dana desa (ADD), dan lainnya maupun dari dalam desa seperti Pendapatan Asli Desa (PAD) serta sumber sumber halal lainnya di desa.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Operasionalisasi Program KKS-Pengabdian terdiri atas 3 tahap yakni tahap persiapan dan perbekalan, tahap pelaksanaan dan rencana keberlanjutan program.

A. Persiapan dan Pembekalan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS-Pengabdian meliputi tahapan berikut ini:

1. Penyiapan dan survei lokasi KKS-Pengabdian,
2. Koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan kegiatan KKS-Pengabdian,
3. Perekrutan mahasiswa peserta KKS-Pengabdian kerjasama dengan LPM UNG,
4. Pembekalan dan pengasuransian mahasiswa peserta KKS-Pengabdian,
5. Pelaksanaan program-program yang menjadi tujuan pelaksanaan KKS,
6. Evaluasi pelaksanaan program-program dilakukan tiap 2 minggu,
7. Penarikan mahasiswa KKS.

Materi persiapan dan pembekalan mahasiswa mencakup teori dan praktek beberapa aspek di bawah ini:

1. Fungsi mahasiswa dalam KKS-Pengabdian dan panduan pelaksanaan KKS-UNG,
2. Pengelolaan keuangan desa,
3. Administrasi desa.

Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS-Pengabdian berlangsung Maret – Mei 2016 sebagai berikut:

1. Acara pelepasan mahasiswa peserta KKS-Pengabdian dari kampus UNG disertai tim dan dosen pembimbing lapangan,
2. Pengantaran 30 Orang mahasiswa peserta KKS-Pengabdian ke Kecamatan Mananggu,
3. Penyerahan mahasiswa peserta KKS-Pengabdian ke kantor kecamatan yang selanjutnya ke masing-masing desa,
4. Pelaksanaan Program-program yang menjadi tujuan,
5. Penyerahan bantuan peralatan dan perlengkapan pengolahan,

6. Monitoring dan evaluasi setiap dua minggu sepanjang periode kegiatan,
7. Penarikan mahasiswa peserta KKS-Pengabdian.

B. Pelaksanaan

Tahapan program yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan desa yang meliputi pemahaman dan peningkatan kapasitas aparat desa terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan desa, pengetahuan akan penyusunan APBDesa serta pemahaman akan undang-undang tentang desa dan peraturan pelaksanaannya yang semuanya akan dielaborasi dalam kegiatan “**Bimbingan Teknis (BIMTEK) Tentang Akuntailitas Pengelolaan Keuangan Desa**” dengan sasaran adalah seluruh aparat desa Se – Kecamatan Mananggu yang pelaksanaannya difokuskan di Desa Buti yang merupakan lokasi penempatan mahasiswa KKS - UNG

Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan aparat desa terkait dengan pemahaman dan pengetahuan akan pengelolaan keuangan desa ini adalah bentuk pelatihan dan bimbingan/pendampingan kepada aparat desa dalam mengikuti proses pelatihan nanti. Disamping itu pembelajaran disertai praktek akan dilakukan oleh mahasiswa bersama-sama dosen (tim pelaksana KKS) dan aparat desa se-Kecamatan Mananggu.

Adapun langkah operasional untuk mengatasi permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa, adalah:

1. Pengawasan Keuangan Desa
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
3. Tata Cara Penyusuna RAPB Desa.

Pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa dihitung dalam volume 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam sebulan. Rata-rata jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) per hari adalah 4,8 sebagai acuan, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3: Uraian Pekerjaan, Program dan Volumennya dalam 2 Bulan

No	Nama Pekerjaan	Volume (JKEM)	Keterangan
1	Pengidentifikasian dan Pencairan informasi tentang pemahaman aparat desa dalam mengelola keuangan desa	576	2 mahasiswa
2	Sosialisasi Pelaksanaan Program Bimtek Pengelolaan keuangan desa kepada aparat desa bekerjasama dengan pemerintah Kec. Manunggu	1440	5 mahasiswa
3	Penyiapan administrasi pelaksanaan Program Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	1440	5 mahasiswa
4	Pelaksanaan Pelatihan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	1440	5 mahasiswa
5	Praktek (simulasi) tentang penyusunan APBDesa	1440	5 mahasiswa
6	Proses pendampingan Aparat Desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan APBDesa	576	2 mahasiswa
7	Evaluasi dan monitoring (MONEV) hasil pelaksanaan kegiatan Bimtek	1728	6 mahasiswa
Total Volume Kegiatan		8640	30 mahasiswa

C. Rencana Keberlanjutan Program

Selain pola kinerja mahasiswa dalam KKS-Pengabdian ini, keberlanjutan program juga turut ditentukan oleh daya serap aparat desa selama kegiatan pelatihan. Kemampuan aparat desa dalam mengadopsi dan mengadaptasi materi yang disampaikan pemberi materi dan mahasiswa pendamping akan berkorelasi pada hasil; yakni kemampuan dan pemahaman aparat desa dalam mengelola keuangan desa juga mampu menyusun rencana APBDesa yang baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan baik.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

A. Hasil Tema KKS - Pengabdian

Keberadaan tema yang diemban bagi pelaksanaan KKS-Pengabdian ini dapat diwujudkan secara tepat dalam pengelolaan dan penyusunan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan, termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian tema jangka panjang secara tidak langsung dengan adanya pengelolaan keuangan yang teratur melalui APBDesa maka akan terserap sumber daya desa baik yang berasal dari luar (dana desa), alokasi dana desa (ADD), dan lainnya maupun dari dalam desa seperti Pendapatan Asli Desa (PAD) serta sumber sumber halal lainnya di desa.

B. Pelaksana Program

Program pengabdian yang diintegrasikan dengan pelaksanaan KKS-Pengabdian UNG dijalankan secara baik dengan keterlibatan pihak akademis (Dosen dan mahasiswa), pihak praktisi yang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 6: Tim Pelaksana Program di Lapangan

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA	Penanggung Jawab	FE – UNG
2.	Siti Pratiwi Husain, SE., M.Si	DPL	FE – UNG
3.	Dr. Walidun Husain, M.Si	DPL	FE – UNG
4.	Iwan Taufiq Purwanto, SE., MBA	Narasumber	Ketua BPKP Provinsi Gorontalo
5.	Suriyanto Suleman	Narasumber	Kepala Kantor PMD Kab. Boalemo

Berikut adalah deskripsi kompetensi/keahlian bidang ilmu yang dimiliki oleh tenaga tim pelaksana sebagai berikut:

a. La Ode Rasuli, SPd., SE., MSA

Memiliki kompetensi di bidang Akuntansi. Salah satu pengurus Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Gorontalo. Berpengalaman sebagai

instruktur Akuntansi dan Manajemen Keuangan. Aktif sebagai pemateri tingkat Provinsi dan kabupaten/ Kota.

b. Siti Pratiwi Husain, SE., M.Si

Memiliki kompetensi di bidang Akuntansi Sektor Publik. Berpengalaman sebagai instruktur Akuntansi dan Manajemen Keuangan. Aktif sebagai pemateri tingkat Provinsi dan kabupaten/ Kota

c. Dr. Walidun Husain, M.Si.

Memiliki kompetensi di bidang Administrasi Pulik. Berpengalaman sebagai instruktur administrasi publik dan aktif sebagai pemateri tingkat Provinsi dan kabupaten/ Kota.

d. Iwan Taufiq Purwanto, SE., MBA

Ketua Ketua BPKP Provinsi Gorontalo. Memiliki kompetensi di bidang Keuangan dan Pengawasan Keuangan Pemerintah. Berpengalaman sebagai instruktur keuangan, pengawasan keuangan pemerintah dan aktif sebagai pemateri tingkat Provinsi dan kabupaten/ Kota.

e. Suriyanto Suleman

Kepala Kantor PMD Kab. Boalemo. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan desa. Berpengalaman sebagai instruktur pengelolaan keuangan desa dan aktif sebagai pemateri tingkat Provinsi dan kabupaten/ Kota.

BAB 5

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

4.1. Deskripsi Kinerja

4.1.1 Sasaran Program

Setelah melakukan observasi di desa Buti, dapat diidentifikasi hal-hal yang dijadikan sebagai program dalam rangka KKS-Pengabdian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Observasi dilakukan di tingkat dusun yang terdapat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Pelaksanaan observasi ini dibantu oleh aparat desa sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan mahasiswa KKS UNG.

4.1.2 Hasil Observasi.

Tim pengusul KKS-Pengabdian melaksanakan observasi dan orientasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini Pemerintah Desa/ aparat desa pada khususnya dan masyarakat Desa Buti pada umumnya. Dari kegiatan observasi awal oleh tim diperoleh persoalan urgen adalah ketidak mampuan dan kurangnya pemahaman aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Dana desa yang demikian besar perlu direncanakan penggunaannya secara tepat dan jelas dalam membelanjai sektor-sektor pembangunan desa. Disadari banyak keluhan dari sebagian aparat pemerintah desa yang mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), sementara siap atau tidak siap setiap tahun dana desa secara terprogram dalam APBN disalurkan ke desa. Oleh karena itu, agar aparat desa memperoleh kemampuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana desa, maka dipandang perlu kepada mereka diberi sentuhan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun APBDesa.

Disamping observasi yang dilakukan oleh Tim KKS-Pengabdian dalam menjangkau kebutuhan masyarakat juga dilakukan observasi oleh teman-teman mahasiswa (Peserta KKS-Pengabdian) sehingga berhasil mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat Desa Buti yang akan dijadikan sebagai

rencana program KKS UNG Periode Maret – April 2016 di Desa Buti Kecamatan mananggu Kabupaten Boalemo yang meliputi:

1. Potensi wilayah desa utamanya terkait pertanian.
2. Keberadaan data penduduk yang belum valid.
3. Sebagian masyarakat, utamanya yang berada di dusun yang jauh dari pemerintah desa masih sangat terbelakang, namun memiliki potensi dan sumberdaya alam yang banyak.
4. Penataan administrasi Pemerintah Desa Buti yang belum lengkap dan tertata rapi
5. Tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan dan pemanfaatan pekarangan rumah yang masih minim

4.1.4 Usulan Program

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan usulan program KKS UNG Periode Maret - April tahun 2016 di Desa Buti Kabupaten Boalemo dibagi 2, yakni program inti dan program tambahan sebagai berikut:

Program Inti

1. Memberikan pemahaman dan pelatihan kepada aparat desa dalam bentuk program Pelatihan Bimbingan Teknik (BIMTEK) Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Se – Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Hal ini dilakukan oleh karena permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh pemerintah Desa Buti sendiri, akan tetapi merupakan masalah urgen yang dihadapi oleh semua aparat desa pada khususnya. Dengan demikian atas permintaan Camat Mananggu dan seluruh Kepala Desa yang ada di lingkungan Kecamatan Mananggu maka program kegiatan inti tersebut dilaksanakan ditingkat kecamatan dengan tetap menjadikan Desa Buti sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan inti tersebut.

Program Tambahan

1. Mengadakan Lomba Olahraga, seni dan keagamaan
2. “Jumat Bersih”

3. Pembuatan Kebun Jagung Percontohan
4. Mengajar pad PAUD dan TK di Desa Buti

4.1.4.1 Pelatihan Program Inti

Menanggapi kebutuhan dan aspirasi mitra yakni Aparat Desa/Pemerintah Desa Se – Kecamatan Mananggu, tim pelaksana menyelenggarakan pelatihan singkat dalam bentuk Bimbingan Teknik (BIMTEK) tentang “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*”. Pelatihan ini merupakan program inti dari pelaksanaan KKS-Pengabdian yang merupakan kolaborasi antara Dosen (tim Pelaksana) dan Mahasiswa sebagai peserta KKS-Pengabdian periode Maret – April. Adapun bentuk pelatihan ini dilakukan dalam bentuk Pemberian materi selama 1 (satu) hari yang terdiri atas 3 sesi dengan narasumber berasal dari tenaga ahli di bidang pelatihan yakni 1). Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo; 2) Kepala DPPKAD Kab. Boalemo; dan 3) Kepala PMD Kab. Bolemo.

Berikut adalah judul Materi dari masing-masing narasumber:

Sesi pertama Materi berjudul “*Pengawasan Keuangan Desa*” Oleh Iwan Taufik Purwanto, SE., MBA (Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo). Tujuan dari pemberian materi pelatihan ini adalah diharapkan para peserta mampu untuk;

- Memahami dan menerapkan prinsip pokok pengawasan keuangan desa
- Memahami dan menerapkan sistem pengawasan keuangan desa yang baik dan benar

Materi pelatihan sesi pertama dalam bentuk power poin dapat dilihat pada lampiran 2.

Materi Sesi dua “*Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*” Oleh Sukri Gobel (Kepala DPPKAD) Kab. Boalemo (berhalangan hadir dan materinya disampaikan oleh pak Suriyanto Suleman). Tujuan pemberian materi pada pelatihan ini ditujukan agar peserta dapat;

- Menyusun pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan desa.

Materi pelatihan sesi kedua dalam bentuk power poin dapat dilihat pada lampiran 2.

Materi Sesi tiga “*Tata Cara Penyusunan RAPB Desa*” Oleh Suriyanto Suleman (Kepala Kantor PMD) Kab. Boalemo. Tujuan pemberian materi pada pelatihan ini ditujukan agar peserta dapat;

- Memahami dan menerapkan prinsip pokok tata cara penyusunan RAPB desa secara efektif dan efisien

Para peserta adalah seluruh Kepala Desa dan aparat desa lainnya se-Kecamatan Mananggu. Daftar hadir peserta pelatihan terdapat dalam *lampiran 3*.

4.1.4.2 Pendampingan Program Inti

Setelah menyelesaikan kegiatan pelatihan, tim pelaksana melakukan pendampingan ke lokasi mitra yakni di Kantor Desa Buti dan beberapa kantor Desa lainnya yang ada di lingkungan Kecamatan Mananggu untuk menyaksikan langsung proses penyusunan pelaporan keuangan desa. Disamping proses pendampingan dilakukan oleh Tim pelaksana (Dosen) juga dilakukan pendampingan langsung oleh mahasiswa peserta KKS-Pengabdian yang memang sebelumnya sudah dibekali akan penyusunan dan pengelolaan keuangan desa. Proses pendampingan ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa selama 4 hari.

Selama proses pendampingan dibagi menjadi 3 kelompok yang dipusatkan pada masing-masing penekanan materi pelatihan sebelumnya.

4.1.4.3 Pelaksanaan Program Tambahan

Pelaksanaan program tambahan oleh peserta KKS-Pengabdian dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan program inti. Pelaksanaan program tambahan dilaksanakan selama 15 hari kerja. Mekanisme pelaksanaannya dibagi menjadi 4 Kelompok panitia yang merupakan kolaborasi antara mahasiswa KKS-Pengabdian dengan rema muda Desa Buti. Kelompok tersebut memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidang pengerjaan yang dibentuk dan disepakati bersama.

Berikut adalah tugas dan fungsi setiap kelompok sesuai dengan bidang pengerjaan yang harus diselesaikan:

Kelompok 1: Lomba Olahraga, Seni dan Keagamaan, yang meliputi:

- a. Lomba Olahraga terdiri atas pertandingan sepak bola dan lari marathon antar SD Se Kecamatan Mananggu.

- b. Lomba seni meliputi lomba dance anak-anak
- c. Lomba keagamaan meliputi lomba adzan anak-anak

Kelompok 2: “Jumat Bersih” meliputi:

- a. Pembersihan lingkungan desa Buti,
- b. Penanaman bunga Polohungo sepanjang ruas jalan di desa Buti,
- c. Pembersihan lokasi bendungan di desa Bendungan,
- d. Pembersihan lapangan/halaman Kantor Kecamatan Manunggu.

Kelompok 3: Pembuatan Kebun Jagung Percontohan, meliputi:

- a. Pembersihan lahan kebun,
- b. Penanaman jagung,
- c. Pemeliharaan tanaman jagung.

Kelompok 4: Membantu Mengajar di PAUD dan TK di Desa Buti

4.2. Capaian Program

Mengacu kepada target dan luaran program pada Bab 2 maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keseluruhan tahapan kegiatan seperti disebut dalam Bab 3 sudah terlaksana, dampak perubahan dan kemajuan bersifat terukur dan disampaikan dalam laporan ini.
- b. Luaran poin 1 yakni terealisasinya kegiatan pelatihan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan proses pendampingan pada mitra sudah dilaksanakan dan terrealisasi 100%.

Adapun aspek yang belum terselesaikan adalah:

- a. Publikasi hasil kegiatan dalam jurnal nasional. Hal ini tetap akan diusahakan/dilakukan sebelum program KKS-Pengabdian ini diseminarkan.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Mengacu kepada target dan luaran program maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program KKS-Pengabdian secara efektif membantu terlaksananya kegiatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa khususnya di tingkat pemerintah Desa Buti.
2. Sejumlah kendala yang dihadapi mitra pada tahap sebelum dilaksanakannya pelatihan bertahap mampu dicarikan solusi dan mitra dalam hal ini pemerintah Desa mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa dengan baik.

6.2 Saran

Adapun yang dapat dijadikan saran dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

1. Kiranya bagi kelompok mitra/ Pemerintah Desa dalam program ini yang telah dinyatakan berhasil dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan desa dengan baik.
2. Keberhasilan kelompok mitra (Pemerintah Desa) dapat disalurkan kepada kelompok mitra lainnya dengan memberikan bimbingan dan penyebaran pengetahuan guna terealisasinya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Lampiran 2. Materi Pelatihan

Lampiran 3: Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

BIODATA KETUA TIM

1. Nama : La Ode Rasuli, S.Pd, SE., MSA
2. NIP : 19770507 200501 1 001
3. Tempat/Tanggal lahir : Wapunto, 7 Mei 1977
4. Program Studi : S1 Akuntansi
5. Alamat Kantor : Jln Jenderal Sudirman No. 6 Kota
Gorontalo
6. Alamat Rumah : Jl. Jeruk Perum Civika UNG Blok A
7. Nomor HP : 081334240878

8. Riwayat Pendidikan

No	Nama Perguruan Tinggi	Gelar	Tahun Selesai	Bidang Studi
1	IKIP Negeri Gorontalo	Sarjana Pendidikan	2001	Pendidikan Akuntansi
2	Universitas Kanjuruhan Malang	Sarjana Ekonomi	2008	Akuntansi
3	Brawijaya, Malang	Magister Sains Akuntansi	2009	Akuntansi

9. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Sponsor
1	2010	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemungut/Pemotong	PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2	2012	Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi pada Universitas Negeri Gorontalo	Pengembangan Program Studi Dana PNBP UNG
3	2013	Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo	PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4	2014	Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia	Ketua Tim

Gorontalo, Juli 2016

Ketua Tim

La Ode Rasuli, S.Pd, SE., MSA
NIP. 19770507 200501 1 001

Biodata Anggota 1

1. Nama : Dr. H. Walidun Husain, M.Si
2. NIP : 195508031982031002
3. Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo, 3 Agustus 1955
4. Program Studi : S1 Manajemen
5. Alamat Kantor : Jl. Jend.Sudirman No.6 Kota Gorontalo
6. Nomor HP : 08114308725
7. Pendidikan

No	Nama Perguruan Tinggi	Gelar	Bidang Studi	Tahun
1	IKIP Negeri Manado	Drs	Ekonomi Administrasi	1981
2	Universitas Sam Ratulangi	Magister Sains	Pemberdayaan Sumberdaya Pembangunan Kajian Administrasi Publik	2001
3	Universitas Negeri Makassar	Doktor	Administrasi Publik	2011

8. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Sponsor
1	2013	Analisis Kompetensi Kepemimpinan, Kompetensi dan Kinerja Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo	Mandiri
2	2011	Structural Officials Connection to and Participation in Budget Drafting	Mandiri
3	2011	Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.	Mandiri
4	2014	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Mandiri

9. Pengalaman Pengabdian kepada masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian	Identitas
1	2012	Administrasi Desa Berbasis Komputer di Kantor Pemerintah Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya	ISSN: 2302-4798, Volume 6 nomor 1, Maret 2012, Lembaga Pengabdian Masyarakat UNG

Gorontalo, Juli 2016
Anggota,

Dr. H. Walidun Husain, M.Si
NIP: 195508031982031002

Biodata Anggota 2

1. Nama : Siti Pratiwi Husain, SE., M.Si
2. NIP : 19860309 200801 2 003
3. Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo, 9 Maret 1986
4. Program Studi : S1 Akuntansi
5. Alamat Kantor : Jl. Jend.Sudirman No.6 Kota Gorontalo
6. Nomor HP : 085255577484
7. Pendidikan

No	Nama Perguruan Tinggi	Gelar	Bidang Studi	Tahun
1	Universitas Sam Ratulangi	Sarjana Ekonomi	Akuntansi	2006
2	Universitas Padjadjaran	Magister Sains	Akuntansi	2011

8. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Sponsor
1	2011	Peranan Partisipasi Pejabat Struktural dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran	Mandiri
2	2012	Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Orang sebagai <i>Var Moderating</i> .	PNBP FEB 2012
3	2013	Identifikasi penentuan harga jual jasa pada Tempat penitipan anak laboratorium kiddie care's Universitas Negeri Gorontalo	PNBP FEB
4	2014	"Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia".	PNBP FEB

9. Pengalaman Pengabdian kepada masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian	Kedudukan
1	2013	Pelatihan Penyusunan Pembukuan Sederhana Pada Usaha Mikro Di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo	Anggota

Gorontalo, Juli 2016
Anggota,

Siti Pratiwi Husain, SE., M.Si
NIP: 19860309 200801 2 003

